

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU DAN MAJALAH

- Ali, Zainuddin. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Jakarta 2001.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, PT Rajagrafindo Persada 2007.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta 2008.
- Brotodihardjo, R.Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Refika Aditama 2008.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2009.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia , Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008.
- Friedmann, W. Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan 1-3), Rajawali pers Jakarta 1990.
- Gunadi, Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi, Majalah Berita Pajak Vol.XLI No.1629 tgl.15 Februari 2009.
- Ibrahim, Johnny.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing Malang 2006.
- . Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Malang 2007.
- Kieso, E. Donald, Jerry J.Weygandt, Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, Jhon Wiley and Sons, Inc 2002 diterjemahkan Penerbit Erlangga 2002.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Yogyakarta 2008.
- Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2008.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Aset Perbankan Syariah, Trustmedia 2009.

Oktaviana, Citra. Potret Perbankan Syariah Di Indonesia, Laboratorium  
Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM Edisi IV/VII 25 Juli  
2007.

Pajak seharusnya berdasarkan substansi perdagangan, Republika 3  
Nopember 2008

Rizal, Jufrina dan Agus Subroto, Bahan Bacaan Program Magister Filsafat  
Hukum Buku I, Fakultas Hukum UI September 2006.

Rosdiana, Haula. Pengantar Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi, Yayasan  
Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan Universitas Indonesia 2003.

-----Agung Kristiyanto, Sukirno, Kupas Tuntas Obyek PPN, PT. Multi  
Utama Consultindo Jakarta 2008.

Sinn, Hans-Werner. The Scandinavian Journal Of Economics Vol.97 No.4 The  
Future of the Welfare State, Blackwell Publishing 2005.

Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan, PT. Refika Aditama 2004.

Subekti dan H. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan  
tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang  
Perkawinan, PT. Pradnya Paramita Jakarta 1990.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa Jakarta 2001.

Sukardji, Untung. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Rajawali  
Pers Jakarta 2004.

----- . Pajak Pertambahan Nilai, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta  
2006.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,  
Salemba Empat 2006.

Waluyo, Akuntansi Pajak, Salemba Empat 2009.

## II. PUBLIKASI ELEKTRONIK

<http://www.albalagh.net>

<http://www.ekonomisyariat.com>

<http://www.iaiglobal.or.id>

<http://raimondfloralamandasa.blogspot.com>

Surya, Muhamad. Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Sang Surya.htm.

### **III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

### **IV. PERATURAN LAINNYA**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tgl.01/04/2000 Tentang Murabahah.

Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tgl.27/11/1991 Perihal Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

PSAK 102 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Murabahah.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-15/PJ.5/1990 tgl.09/07/1994 Perihal PPN atas Jasa Pialang (broker).

- Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-10/PJ.42/1994 tgl.22/03/1994 Perihal Perlakuan PPh Dan PPN Terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat Dari Masa Sewa Guna Usaha Yang Disyaratkan Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-25/PJ.53/1995 tgl.08/06/1995 Perihal Pengenaan PPN Atas Jasa Custodian.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-34/PJ.53/1995 tgl.03/05/1995 Perihal Perlakuan PPN Atas Jasa Consumer Credit, Credit Card, Dan Debit Card.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-207/PJ.313/2001 tgl.03/05/2001 Perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Bersama (Sindikasi) Kepada Nasabah.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003 tgl.10/03/2003 Perihal Perlakuan PPN Atas Transaksi Bai' Al-Murabahah.
- Surat Dirjen Pajak No.S-353/PJ.53/2005 tgl.27/04/2005 Perihal Perlakuan PPN Atas Jasa Agen Pembayaran Dan Agen Jaminan.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-497/PJ.53/2005 tgl.03/06/2005 Perihal PPN Atas Penyerahan Fee Jasa Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Escrow.
- Surat Dirjen Pajak Nomor.S-813/PJ.53/2005 tgl.05/09/2005 Perihal Perlakuan PPN Atas Transaksi Sale & Lease Back.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-947/PJ.53/2005 tgl.31/10/2005 Perihal Perlakuan PPN Atas Jasa Pembacaan Meter dan Jasa Perbankan.
- Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor S-249/PJ.53/2005 tgl.12/04/2005 Perihal Perlakuan PPN Atas Jasa Keagenan Asuransi.
- Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor S-822/PJ.53/2005 tgl.07/09/2005 Perihal Perlakuan PPN Atas Jasa Keagenan Asuransi.
- Surat Direktur PPN dan PTLL No.S-917/PJ.52/2005 tgl.13/10/2005 Perihal Permohonan Penegasan Perlakuan Perpajakan Atas Produk Joint Financing.